

Accountability as The Key to Success: The Effect of Village Funds and Village Fund Allocations on Village Development Performance in Bojonegoro Regency in 2024

Hamzah Shalahuddin¹

Kurnia²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, STIESIA Surabaya, Indonesia

*Correspondences : shalah.hamz@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Village Funds and Village Fund Allocations on Village Development Performance with Accountability as an intervening variable in Bojonegoro Regency in 2024. The research is motivated by the large allocation of village funds that has not optimally improved development performance, making accountability important in fund management. This study uses path analysis with secondary data obtained from village government documents and APBDes realization reports. The results indicate that Village Funds, Village Fund Allocations, and Accountability do not affect Village Development Performance. However, Village Funds and Village Fund Allocations significantly affect Accountability. In addition, Accountability is unable to mediate the influence of Village Funds and Village Fund Allocations on Village Development Performance. These findings show that large village funds do not guarantee improved development performance without good governance and accountability. Therefore, strengthening accountability is essential to support effective village fund management and sustainable village development.

Keywords: Village Fund, Village Fund Allocation, Accountability, Village Development Performance, Village Governance

Akuntabilitas sebagai Kunci Sukses: Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pembangunan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pembangunan Desa dengan Akuntabilitas sebagai variabel intervening di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024. Penelitian dilatarbelakangi oleh besarnya alokasi dana desa yang belum mampu meningkatkan kinerja pembangunan secara optimal sehingga diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Penelitian menggunakan metode analisis jalur (path analysis) dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen pemerintah desa dan laporan realisasi APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pembangunan Desa. Namun, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas. Selain itu, Akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pembangunan Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya dana desa belum menjamin peningkatan kinerja pembangunan tanpa didukung tata kelola dan akuntabilitas yang baik guna mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Kinerja Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 36 No. 4
Denpasar, 30 April 2026
Hal. 876-894

DOI:
10.24843/EJA.2026.v36.i04.p01

PENGUTIPAN:

Shalahuddin, H. & Kurnia (2026). Accountability as The Key to Success: The Effect of Village Funds and Village Fund Allocations on Village Development Performance in Bojonegoro Regency in 2024. *E-Jurnal Akuntansi*, 36(4), 876-894

RIWAYAT ARTIKEL:

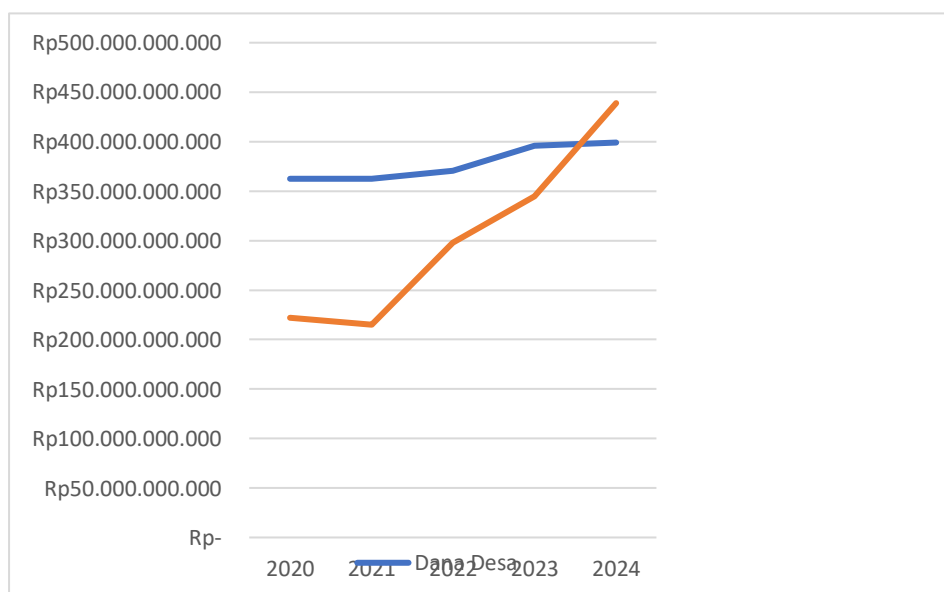
Artikel Masuk:
2 Januari 2026
Artikel Diterima:
2 April 2026

PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat dalam hal memajukan kesejahteraan umum ini terus mengupayakan pembangunan sampai ke daerah pedesaan. Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah pedesaan dan perkotaan. Melalui Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan - kewenangan dan anggaran langsung kepada desa untuk mengelola pembangunannya secara mandiri. Salah satu wujud kebijakan dari pemerintah adalah adanya kewenangan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan (Kemendes PDPT, 2020). Setiap desa menerima dana yang bersumber dari pemerintah daerah melalui APBD maupun dari pemerintah pusat melalui APBN.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana secara khusus yang ditujukan langsung kepada desa sebagai upaya untuk memperkuat otonomi desa dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal yang dikenal dengan istilah Dana Desa (Kemendes PDPT, 2020). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, Dana tersebut di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang (Tang *et al.*, 2022). Tujuan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Rima *et al.*, 2022).

Pengelolaan yang efektif melalui musyawarah desa diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata, peningkatan pelayanan publik, penguatan perekonomian, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa juga diupayakan untuk mengangkat kualitas desa tertinggal agar setara dengan desa maju, melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dampak nyata dari Dana Desa dapat dilihat pada tersedianya infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan sarana publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Rijal & Handajani, 2021; Daud *et al.*, 2022; Seputro & Muhammad, 2022; Tang *et al.*, 2022; Halim & Taryani, 2023; Wardani & Wahidahwati, 2024). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan rincian dari keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung desentralisasi otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik (Kuswanti & Kurnia, 2020). Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 28 kecamatan dan 419 desa, dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian dan sumber daya alam. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam jumlah yang sangat besar.



Gambar 1. Grafik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2024

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan Gambar 1. dapat diasumsikan bahwa besaran anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2024 terdistribusi dari pemerintah pusat dan daerah dengan besaran nilai yang sangat besar. Berdasarkan besarnya dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pemanfaatan dana tersebut. Beberapa desa di Bojonegoro, seperti Desa Pucangarum Kecamatan Baureno menunjukkan ketidakefektifan penggunaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 yang lebih banyak difokuskan pada operasional pemerintah desa dan pembangunan fasilitas yang kurang prioritas dimana kondisi infrastruktur yang masih minim justru memprioritaskan penggunaan APBDDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik (Imaduddin *et al.*, 2022). Selain itu kurang efektifnya dalam pengelolaan juga ditunjukkan dengan adanya penggunaan dana desa memprioritaskan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibandingkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dan mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Beberapa kasus tersebut menunjukkan kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno. Selain itu, konflik internal lain terjadi di Desa Talok Kecamatan Kalitidu menyebabkan hilangnya Dana Desa tahap I hingga III senilai 793 Juta Rupiah pada tahun 2024 yang berdampak negatif pada proses kinerja pembangunan desa tersebut. Kinerja pembangunan desa menjadi isu krusial dalam konteks implementasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Adawiyah *et al.* (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah desa.



Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003-2024

Sumber : Data Penelitian, 2025

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 11,69 persen atau setara dengan 147,33 ribu jiwa. Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 12,18 persen (153,25 ribu jiwa), namun tetap menunjukkan bahwa lebih dari sepersepuluh penduduk Bojonegoro masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan desa, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan yang nyata. Hal tersebut menegaskan bahwa efektivitas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak bisa hanya diukur dari sisi input keuangan, tetapi harus dianalisis dari kinerja pembangunan desa sebagai outcome.

Sebagai respons atas kebutuhan pengukuran kinerja pembangunan desa secara komprehensif, pemerintah menetapkan Indeks Desa sebagai instrumen evaluasi tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Indeks Desa merupakan suatu indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan berdasarkan komponen utama layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Pasal 32 ayat 2 menyebutkan kategorisasi dari data Indeks Desa adalah desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Indeks Desa mengukur capaian pembangunan berdasarkan dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah berstatus desa mandiri dan desa maju. Namun, capaian tersebut masih menyisakan pertanyaan penting mengenai sejauh mana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa benar - benar menjadi faktor penentu utama dalam peningkatan kinerja pembangunan desa, atau justru dipengaruhi oleh faktor tata kelola lainnya.

Dalam konteks ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi faktor kunci yang menjembatani antara kebijakan fiskal desa dan capaian

pembangunan. Akuntabilitas tidak hanya bermakna sebagai kewajiban administratif dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme institusional yang memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Upaya penguatan akuntabilitas di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan melalui digitalisasi sistem administrasi desa, pelatihan aparatur, serta keterbukaan informasi publik. Namun, efektivitas mekanisme tersebut dalam menyalurkan pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kinerja pembangunan desa masih perlu diuji secara empiris. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah syarat untuk tata kelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, temuan empirisnya belum konsisten jika dihubungkan langsung dengan kinerja pembangunan desa. Riset kuantitatif yang dilakukan Fathony & Sitokmabin (2024) dengan judul "Pengaruh akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur (Kecamatan Baleendah)". Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang sering diposisikan sebagai proksi kinerja pembangunan desa baik secara parsial maupun simultan bersama partisipasi masyarakat. Temuan ini menguatkan asumsi akuntabilitas memberikan pengaruh pada kinerja yang lazim diadopsi dalam model Dana Desa ataupun Alokasi Dana Desa. Namun, bukti lain memperlihatkan relasi yang lebih kompleks.

Penelitian Permatasari *et al.*, (2024) dengan judul "Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dimediasi Oleh Indeks Pembangunan Manusia Dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas". Hasil penelitian tersebut menemukan akuntabilitas tidak memoderasi pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan (indikator outcome pembangunan), sementara Indeks Pembangunan Manusia justru memediasi hubungan tersebut. Ini menyiratkan bahwa akuntabilitas saja tidak cukup "menyalurkan" pengaruh Dana Desa ke outcome pembangunan jika tidak diikuti penguatan kualitas pembangunan manusia.

Penelitian Dewi *et al.*, (2022) dengan judul "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)". Hasil penelitian menyebutkan antara Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas memperlihatkan hubungan secara tidak langsung yaitu penguatan SPI berupa teknologi terhadap akuntabilitas yang lebih baik. Namun, hubungan akuntabilitas terhadap kinerja pembangunan sering tidak diukur atau hanya disiratkan melalui kualitas laporan keuangan. Ini membuka celah teori empiris bahwa akuntabilitas mungkin berperan sebagai mediator (antara tata kelola dan kinerja) atau moderator (memperkuat pengaruh DD/ADD terhadap kinerja), tetapi desain uji tersebut jarang diadopsi.

Penelitian Puspa & Prasetyo (2020) dengan judul "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Hasil penelitian tersebut menggarisbawahi heterogenitas kapasitas aparatur, partisipasi warga,

serta pengawasan sebagai determinan akuntabilitas. Misalnya, kompetensi perangkat desa dan kualitas pengendalian internal terbukti memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, tetapi kembali tidak selalu ditautkan ke indikator kinerja pembangunan desa. Kesenjangan ini membuat sulit menarik kesimpulan kausal yang kuat bahwa akuntabilitas tanpa syarat tertentu pasti berdampak pada kinerja pembangunan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap pembangunan desa, serta bahwa akuntabilitas merupakan prasyarat penting dalam tata kelola keuangan publik. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menempatkan akuntabilitas sebagai variabel independen atau sekadar faktor pendukung, dan belum banyak yang mengujinya sebagai variabel intervening yang menjelaskan proses kausal antara kebijakan fiskal desa dan kinerja pembangunan desa. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji konteks Kabupaten Bojonegoro dengan karakteristik alokasi dana yang besar masih sangat terbatas.

Keterbaruan penelitian ini berbeda dari sebelumnya karena penelitian ini menguji akuntabilitas sebagai variabel intervening, bukan sekadar variabel independen, sehingga mampu menjelaskan mekanisme bagaimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memengaruhi kinerja pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan Indeks Desa Tahun 2024 sebagai proksi kinerja pembangunan desa yang bersifat multidimensional (layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola), bukan hanya pembangunan fisik. Penelitian ini dilakukan secara spesifik pada Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki karakteristik alokasi dana desa sangat besar namun masih menghadapi persoalan efektivitas pembangunan dan kemiskinan, sehingga menjadi konteks empiris yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai stimulus desa demi percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan empiris dengan menguji secara kuantitatif pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kinerja pembangunan desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui akuntabilitas sebagai variabel intervening. Dengan menggunakan Indeks Desa sebagai indikator kinerja pembangunan desa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban publik dalam pengelolaan keuangan desa, serta menghasilkan temuan empiris yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausal komparatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dalam proses pelaksanaan penelitiannya itu banyak menggunakan angka - angka disertai dengan gambar, tabel grafik atau tampilan lainnya mulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai pada hasil atau penarikan kesimpulannya (Machali, 2019:21). Desain penelitian kausalitas komparatif penting dalam riset kebijakan publik, termasuk pengelolaan keuangan

desa, karena mampu menjelaskan implikasi kebijakan secara lebih mendalam dan berbasis data (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini menguji sejauh mana variabel independen (dana desa dan alokasi dana desa) memengaruhi variabel dependen (kinerja pembangunan desa) secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel *intervening* (akuntabilitas). Dengan demikian, desain penelitian ini bersifat kausalitas dengan pendekatan analisis jalur (*path analysis*).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 419 desa, yang menjadi unit analisis populasi dalam penelitian. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh atau total *sampling* yang mana teknik penentuan sampel menggunakan seluruh anggota populasi 419 desa di Kabupaten Bojonegoro selama periode tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa kriteria. Adapun kriteria inklusi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Pengambilan sampel berdasarkan desa yang menerima anggaran Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, Desa yang menerima anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, Desa yang mempublikasikan Kinerja Pembangunan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dan Desa yang mempublikasikan Akuntabilitas berdasarkan realisasi penggunaan APBDes di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent (X) yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, variabel *intervening* (Z) yaitu Akuntabilitas, dan variabel dependen (Y) yaitu Kinerja Pembangunan Desa. Dana Desa (X_1) didefinisikan sebagai bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan desa. Dana Desa diukur berdasarkan total realisasi alokasi dana sesuai dengan formula dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Satuan pengukuran yang digunakan adalah rasio dalam satuan rupiah (Rp), yang mencerminkan besaran dana yang diterima dan direalisasikan oleh desa. Alokasi Dana Desa (ADD) (X_2) didefinisikan sebagai dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang kemudian dialokasikan kepada desa.

ADD dalam penelitian ini diukur berdasarkan total realisasi alokasi dana desa yang bersumber dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dari Hasil Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. ADD diperoleh dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Variabel ini diukur dalam bentuk rasio dengan satuan rupiah (Rp) sebagai indikator besarnya dana yang diterima desa.

Akuntabilitas (Z) diartikan sebagai tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang tercermin dalam kemampuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Pengukuran

akuntabilitas didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024 (Sari, 2021; Arimanondang *et al.*, 2022; Krisanti & Sapari, 2023; Wijaya *et al.*, 2023; Ratnasari & Rahmawati, 2024). Variabel ini diukur dalam bentuk rasio berdasarkan tingkat kesesuaian, ketepatan, dan kelengkapan laporan keuangan desa dalam mencerminkan penggunaan dana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja Pembangunan Desa (Y) merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa Pasal 1 ayat 3). Pengukuran kinerja pembangunan desa didasarkan pada indikator Indeks Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, yang mencakup dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Variabel ini diukur menggunakan skala rasio dengan rentang nilai 0-1 yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Data Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diperoleh dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Data Kinerja Pembangunan Desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dan Data Akuntabilitas diperoleh dari Laporan Realisasi APBDes yang ditampilkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan software SPSS versi 25.0. Tahap awal dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Kinerja Pembangunan Desa melalui nilai rata-rata, median, standar deviasi, dan distribusi data. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov dan P-P Plot), uji multikolinearitas (*VIF dan Tolerance*), uji autokorelasi (Durbin-Watson), dan uji heteroskedastisitas guna memastikan model regresi memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Setelah itu dilakukan uji kelayakan model (uji F) untuk menilai pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis jalur dengan membangun dua model regresi, yaitu model pertama untuk menguji pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Akuntabilitas, serta model kedua untuk menguji pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pembangunan Desa, sehingga dapat dianalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung (mediasi) Akuntabilitas dalam hubungan antar variabel penelitian. Persamaan model langsung (hipotesis H₁-H₅) adalah sebagai berikut:

$$\text{Persamaan H}_1: Y(\text{AK}) = \alpha + X_1(\text{DD})B_1 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Persamaan H}_2: Y(\text{AK}) = \alpha + X_2(\text{ADD})B_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Persamaan H₃: $Y(KPD) = \alpha + X_1(DD)\beta_1 + \varepsilon$ (3)

Persamaan H₄: $Y(KPD) = \alpha + X_2(ADD)\beta_2 + \varepsilon$ (4)

Persamaan H₅: $Y(KPD) = \alpha + Z(AK) + \varepsilon$ (5)

Model mediasi (H₆ dan H₇) terdapat 2 opsi yaitu :

Dua persamaan terpisah (Uji mediasi terpisah untuk DD dan ADD)

Persamaan 1 : $Y(KPD) = \alpha + X_1(DD)\beta_1 + Z(AK) + \varepsilon$ (6)

Persamaan 2 : $Y(KPD) = \alpha + X_2(ADD)\beta_2 + Z(AK) + \varepsilon$ (7)

Satu persamaan gabungan (Uji simultan H₆ dan H₇)

$Y(KPD) = \alpha + X_1(DD)\beta_1 + X_2(ADD)\beta_2 + Z(AK) + \varepsilon$ (8)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran uji statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran secara umum seperti nilai rata - rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), dan standar deviasi dari masing - masing variabel yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Kinerja Pembangunan Desa (KPD), dan Akuntabilitas (AK). Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	419	652.117.000	2.092.383.000	951.965.233,890	205.905.835,084
ADD	419	872.347.973	3.116.020.600	1.047.042.151,960	184.435.745,436
KPD	419	0,718	0,973	8.412,696	468,903
AK	419	1.998.555.000	10.494.822.960	4.172.711.273,180	830.349.096,425

Sumber: Data Penelitian, 2025

Variabel DD memiliki rentang nilai antara 652.117.000 hingga 2.092.383.000. Rata - rata variabel ini adalah 951.965.233,890 yang lebih besar dari standar deviasi sebesar 205.905.835,084. Rentang nilai variabel ADD berada di antara 872.347.973 hingga 3.116.020.600. Rata - rata variabel ini adalah 1.047.042.151,960 lebih besar dari standar deviasi sebesar 184.435.745,436. Variabel KPD memiliki rentang nilai antara 0,718 hingga 0,973. Rata - rata variabel ini adalah 8.412,696 lebih besar dari standar deviasi sebesar 468,903. Variabel AK memiliki rentang nilai antara 1.998.555.000 hingga 10.494.822.960. Rata - rata variabel ini adalah 4.172.711.273,180 lebih besar dari standar deviasi sebesar 830.349.096,425

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residual menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak mengalami penyimpangan yang signifikan. Pola penyebaran residual tersebut mengindikasikan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Selain itu, penyebaran titik residual terlihat berada di sekitar garis diagonal secara relatif seimbang dari awal hingga akhir pengamatan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Hasil tersebut juga diperkuat oleh pengujian statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		419
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	-0,000
	<i>Std. Deviation</i>	539.043.525,172
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,090
	<i>Positive</i>	0,088
	<i>Negative</i>	-0,090
<i>Test Statistic</i>		0,090
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,000 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data Penelitian 2025

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residual model regresi memiliki nilai statistik K-S sebesar 0,090 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa secara statistik residual tidak berdistribusi normal. Meskipun demikian, kondisi ini masih dapat diterima dalam analisis regresi modern, khususnya ketika jumlah sampel besar, seperti pada penelitian ini yang melibatkan 419 observasi, karena berdasarkan *Central Limit Theorem* distribusi residual cenderung mendekati normal dan tidak mengganggu keandalan estimasi parameter regresi. Dengan demikian, meskipun uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan ketidaknormalan secara statistik, residual model tetap memenuhi asumsi regresi secara praktis dan tidak menghambat kelanjutan analisis inferensial dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis visual pada Histogram, Normal P-P Plot, dan Kolmogorov-Smirnov Test dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi pertama (yang menguji pengaruh DD dan ADD serta AK terhadap KPD) terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas pada persamaan pertama yang menguji pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap variabel intervensi Akuntabilitas (AK), diketahui bahwa kedua variabel independen tidak menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Tolerance untuk DD dan ADD yang sama-sama berada pada angka 0,862, jauh di atas batas minimum 0,10, sehingga mengindikasikan tidak adanya masalah korelasi tinggi antar variabel bebas. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk kedua variabel sebesar 1,160 yang masih berada jauh di bawah ambang 10 menegaskan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik multikolinearitas. Dengan demikian, DD dan ADD dapat dinyatakan tidak saling memengaruhi secara berlebihan dalam menjelaskan variabel Akuntabilitas,

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Pertama

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	298974400,929	168349683,484		1,776	0,076		
DD	0,724	0,138	0,180	5,239	0,000	0,862	1,160
ADD	3,041	0,154	0,676	19,710	0,000	0,862	1,160

a. Dependent Variable: AK

Sumber: Data Penelitian, 2025

Uji multikolinearitas pada persamaan kedua yang melibatkan variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Akuntabilitas (AK) sebagai prediktor terhadap variabel dependen Kinerja Pembangunan Desa (KPD), diperoleh bahwa ketiga variabel bebas tidak menunjukkan adanya permasalahan multikolinearitas yang dapat mengganggu estimasi model regresi. Nilai Tolerance masing-masing variabel masih berada di atas batas minimal 0,10, yaitu 0,809 untuk DD, 0,446 untuk ADD, dan 0,421 untuk AK. Demikian pula, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk ketiga variabel berada pada rentang 1,236 hingga 2,373, yang jauh di bawah ambang batas 10. Hasil ini mengindikasikan bahwa DD, ADD, dan AK tidak memiliki korelasi linear yang berlebihan satu sama lain dalam menjelaskan KPD, sehingga tidak terjadi bias dalam estimasi koefisien regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	8260,733	145,312			56,848	0,000		
DD	-2,911E-7	0,000	-0,128		-2,372	0,018	0,809	1,236
ADD	3,352E-7	0,000	0,132		1,817	0,070	0,446	2,242
AK	1,870E-8	0,000	0,033		0,444	0,658	0,421	2,373

a. Dependent Variable: KPD

Sumber: Data Penelitian, 2025

Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 1,826. secara umum, pedoman praktis menyatakan bahwa nilai DW yang mendekati 2 mengindikasikan tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi. Dengan nilai 1,826 yang sangat dekat dengan 2, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi (baik positif maupun negatif) pada Persamaan Pertama.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson Persamaan Pertama

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,761 ^a	0,579	0,577	540337749,184	1,826

a. Predictors: (Constant), ADD, DD

b. Dependent Variable: AK

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson Persamaan Kedua

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,159 ^a	0,025	0,018	464,6377	1,768

a. Predictors: (Constant), AK, DD, ADD

b. Dependent Variable: KPD

Sumber: Data Penelitian, 2025

Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 1,768. Nilai ini berada dalam rentang di sekitar angka 2 (1,768 mendekati 2), yang berdasarkan pedoman umum pengujian DW, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Pertama

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	101343373,579	121708555,695		0,833	0,406
	DD	0,174	0,100	0,091	1,739	0,083
	ADD	0,098	0,112	0,046	0,877	0,381

a. *Dependent Variable: Abs_Res1*

Sumber: Data Penelitian, 2025

Uji *glejser* menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual (*Abs_Res1*). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (*Sig.*) dari masing-masing variabel independen, yaitu Dana Desa (*DD*) sebesar 0,083 dan Alokasi Dana Desa (*ADD*) sebesar 0,381. Nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 (*Sig.* > 0,05), maka hipotesis nol (*H0*) yang menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Kedua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	245,745	94,768		2,593	0,010
	DD	1,266E-7	0,000	0,086	1,582	0,114
	ADD	-6,014E-8	0,000	-0,037	-0,500	0,617
	AK	1,107E-8	0,000	0,030	0,403	0,687

a. *Dependent Variable: Abs_Res2*

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil pengujian menunjukan bahwa nilai signifikansi (*Sig.*) untuk seluruh variabel independent melebihi ambang batas 0,05 (*Sig.* > 0,05) yaitu *DD* sebesar 0,114, *ADD* sebesar 0,617 dan *AK* sebesar 0,687. Nilai signifikansi *DD*, *ADD*, dan *AK* semuanya lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak ada variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variasi residual.

Uji kelayakan model (uji *F*) diketahui bahwa nilai *F* sebesar 3,570 dengan nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0,014. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari batas $\alpha = 0,05$, sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2312162,418	3	770720,806	3,570	0,014 ^b
	Residual	89593600,088	415	215888,193		
	Total	91905762,506	418			

a. *Dependent Variable: KPD*

b. *Predictors: (Constant), AK, DD, ADD*

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil analisis jalur hipotesis 1-3 menunjukkan bahwa variabel Dana Desa (DD) terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) memiliki nilai koefisien regresi ke arah negatif sebesar -0,128 dan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pembangunan Desa, hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa meningkat maka Kinerja Pembangunan Desa menurun, sehingga hipotesis 1 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini sejalan dengan Halim & Taryani (2023); Yulitasari & Tyas (2020) dimana pemberian Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pembangunan desa (indeks desa membangun). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh yang nyata terhadap pembangunan, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan transparansi, pertanggung jawaban, amanah dan pengelolaan yang berpihak pada kepentingan warga.

Tabel 10. Hasil Uji Analisis Jalur (Hipotesis 1-3)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8260,733	145,312			
	DD	-2,911E-7	0,000	-0,128	-2,372	0,018
	ADD	3,352E-7	0,000	0,132	1,817	0,070
	AK	1,870E-8	0,000	0,033	0,444	0,658

a. Dependent Variable: KPD

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pada variabel Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,132 dan nilai signifikansi $0,070 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ADD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pembangunan Desa. Arah koefisien beta adalah positif sesuai dengan arah hipotesis namun nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 2 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan Khasanah & Marisan (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan penelitian Sengaji & Asyik (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, hasil ini semakin relevan ketika melihat struktur APBDes tahun 2024. Mayoritas desa masih mengalokasikan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, operasional kantor, serta kegiatan pemerintahan yang bersifat administratif. Belanja-belanja tersebut tidak terlihat secara langsung dalam indikator pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup capaian infrastruktur dasar, pembangunan fisik, dan pelayanan masyarakat.

Hasil tabel penelitian menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (AK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,033 dengan nilai signifikansi $0,658 > 0,05$, maka, dapat disimpulkan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pembangunan Desa meskipun arah koefisien beta adalah positif. Dengan demikian hipotesis 3 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan Dewi & Sapari (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa dan penelitian Setyawati (2022) dimana variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa tingkat akuntabilitas yang dimiliki desa – desa di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi capaian pembangunan desa, meskipun desa telah melaksanakan prosedur akuntabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan desa.

Tabel 11. Hasil Uji Analisis Jalur (Hipotesis 4-5)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	298.974.400,929	168.349.683,484		1,776	0,076
	DD	0,724	0,138	0,180	5,239	0,000
	ADD	3,041	0,154	0,676	19,710	0,000

a. *Dependent Variable: AK*

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil analisis jalur hipotesis 4-5 menunjukkan bahwa variabel Dana Desa (DD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,180 dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), yang berarti Dana Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas. Arah koefisien beta juga ke arah positif, sesuai dengan arah hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi Dana Desa maka Akuntabilitas juga akan meningkat. Dengan demikian hipotesis 4 diterima.

Secara regulatif, peningkatan Dana Desa juga diikuti oleh tuntutan akuntabilitas yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mensyaratkan penyusunan dokumen APBDes, RKPDdes, laporan realisasi, laporan pertanggung jawaban (LPJ), dan publikasi informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini menandakan bahwa semakin besar DD yang diterima desa, semakin besar pula kewajiban administratif dan substantif yang harus dipenuhi, sehingga akuntabilitas meningkat secara langsung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armansyah *et al.*, 2020; Making & Handayani, 2021; Diansari *et al.*, 2023; Murapi *et al.*, 2025).

Berdasarkan hasil regresi, variabel Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,180 dan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) yang berarti Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas. Artinya, bahwa semakin besar Alokasi Dana Desa, maka akuntabilitas juga akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis 5 diterima.

Hasil penelitian ini semakin relevan terhadap Kabupaten Bojonegoro mengingat struktur APBDes tahun 2024 menunjukkan bahwa ADD menempati posisi signifikan dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa, termasuk pembiayaan aparatur, biaya administrasi, dan kegiatan tata kelola. Dengan meningkatnya ADD, desa – desa memiliki kemampuan lebih besar untuk memperbaiki sistem pelaporan, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, dan memastikan proses akuntabilitas berjalan sesuai peraturan. Komponen ADD terkait langsung dengan aspek pemerintahan dan administrasi desa, maka besaran ADD berkontribusi langsung terhadap peningkatan

kemampuan desa untuk melakukan pertanggung jawaban, dokumentasi, dan pelaporan yang berkualitas.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis 1 - 5 dengan hasil diatas, selanjutnya yaitu pengujian mediasi untuk mendapatkan hasil hipotesis 6 - 7. Pengujian mediasi untuk mendapatkan p-value dengan menggunakan uji sobel (sobel calculator). Perhitungan uji sobel yaitu dengan memasukan t hitung pengaruh langsung DD pada AK pada ta dan AK pada KPD pada fb. Berikut adalah hasilnya dengan menggunakan sobel calculator.

	Input	Jenis Uji Tes	Test statistic	p-value
ta	5,239	Sobel test	0,442	0,658
fb	0,444			

Tabel 12. Pengujian Mediasi P-Value (Uji Sobel) DD - AK - KPD

Sumber: Data Penelitian, 2025

	Input	Jenis Uji Tes	Test statistic	p-value
ta	19,710	Sobel test	0,443	0,657
fb	0,444			

Tabel 13. Pengujian Mediasi P-Value (Uji Sobel) ADD - AK - KPD

Sumber: Data Penelitian, 2025

Kemudian, koefisien pengaruh tidak langsung didapatkan dengan cara perkalian koefisien pengaruh langsung antara DD dengan AK dab AK dengan KPD.

Tabel 14. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung (Hipotesis 6 dan 7)

Pengaruh Tidak Langsung	Koefisien Jalur	P-value	Kesimpulan
DD -> AK -> KPD	$0,724 * 1.870E-8 = 4,319$	0,658	Tidak Signifikan
ADD-> AK -> KPD	$3,041 * 1.870E-8 = 7,457$	0,657	Tidak Signifikan

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil analisis jalur hipotesis 6-7 hasil pengujian pengaruh tidak langsung antara Dana Desa (DD) melalui Akuntabilitas (AK) terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) diperoleh besarnya koefisien jalur sebesar 4,319 dan nilai signifikansi sebesar 0,658. Dikarenakan nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara Dana Desa (DD) melalui Akuntabilitas (AK) terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) atau variabel Akuntabilitas (AK) tidak memediasi hubungan Dana Desa (DD) terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) sehingga hipotesis 6 ditolak.

Hal ini didukung oleh penelitian Khusna (2024) yang memuat temuan bahwa akuntabilitas pengalokasian dana desa berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan desa walaupun secara teori seharusnya positif. Ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas belum langsung mendorong kinerja keuangan/desa karena masalah implementasi atau konteks lokal. akuntabilitas alokasi dana desa tidak berpengaruh positif terhadap kinerja finansial desa, bahkan menunjukkan koefisien negatif sebelum dimoderasi oleh faktor digitalisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat administratif dan prosedural, sehingga belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Tingginya tuntutan pelaporan justru berpotensi menciptakan beban birokratis yang mengalihkan fokus aparatur dari perencanaan

dan pelaksanaan program pembangunan menuju kepatuhan dokumen semata. Akibatnya, meskipun desa semakin tertib secara administratif, kinerja keuangan maupun kinerja pembangunan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil pengujian serupa pengaruh tidak langsung antara Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Akuntabilitas (AK) terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) diperoleh besarnya koefisien jalur sebesar 7,457 dan nilai signifikansi sebesar 0,657. Dikarenakan nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Akuntabilitas (AK) terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) atau variabel Akuntabilitas (AK) tidak memediasi hubungan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) sehingga hipotesis 7 ditolak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Making dan Handayani (2021) bahwa meskipun ADD berperan dalam penyediaan belanja operasional dan administratif desa, ADD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan desa, baik secara langsung maupun melalui mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penelitian tersebut lebih banyak berkaitan dengan kepatuhan administratif terhadap prosedur pelaporan, sehingga tidak efektif sebagai mekanisme yang memediasi hubungan antara ADD dan capaian pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penggunaan dana dan orientasi program yang berbasis hasil pembangunan harus menjadi fokus utama agar ADD dapat berdampak nyata terhadap pembangunan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Akuntabilitas (AK) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pembangunan Desa (KPD) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Dana Desa yang meningkat belum mampu meningkatkan kinerja pembangunan desa, sedangkan ADD lebih berfokus pada belanja rutin dan operasional pemerintahan desa sehingga tidak berdampak langsung pada pembangunan fisik maupun sosial. Akuntabilitas juga belum mampu meningkatkan KPD karena masih bersifat administratif dan belum substantif. Namun, DD dan ADD berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas, dengan ADD menjadi variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penguatan tata kelola dan pertanggungjawaban desa. Selain itu, Akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh DD maupun ADD terhadap KPD. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran (mixed methods) agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dana desa dan kinerja pembangunan desa.

REFERENSI

- Adawiyah, R., S. Mire., A. Noor. 2020. Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. *INOVASI* 16(1): 111-119
- Arimanondang, P., A. I. Kesuma, I. S. Kurniawan. 2022. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* 7(3): 1-13

- Armansyah, M., A. T. Sompa, T. Hidayat. 2020. Village Management Accountability; Study in Bincau Muara Village, Martapura District, Banjar District. *Saudi Journal of Economics and Finance* 4(6): 230-240
- Badan Pusat Statistik. 2024. Profil Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Maret 2024. Juli. BPS Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro
- Creswell, J. W., & J. D. Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Sage Publications. California
- Daud, N. R., F. Bumulo, R. Hasiru. 2022. Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Mutiara. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 15(1): 43-52
- Dewi, F. G. R., & Sapari 2020. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(5): 1-20
- Dewi, L.P., K. Sunaryo, R. Yulianti. 2022. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9(2): 323-340
- Diansari, R. E., A. A. Musah, J. B. Othman. 2023. Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia : The Moderating Role of Prosocial Behaviour. *Cogent Business & Management* 10(2): 1-26
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2024. Indeks Desa Membangun Kabupaten Bojonegoro. <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa.html@detail=indeks-desa-membangun> . 24 Juli 2025 (21.40)
- Fathony, A. A., & L. Sitokmabin. (2024). Pengaruh akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur (Kecamatan Baleendah). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 15(2), 123–136.
- Halim, A., & A.Taryani. 2023. Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4(1): 51-71
- Imaduddin, A.K., Maslichah, D. Sudaryanti. 2022. Analisis Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat. *E-JRA* 11(5): 69-82
- Khasanah, A. N., & I. Marisan. 2022. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6(1): 32-48
- Krisanti, P., & Sapari. 2023. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 12(10): 1-18
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(2): 1-22
- Machali, I. 2018. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Kuantitatif*. Edisi Pertama: Cetakan Pertama. Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Making, A. A. L., & N. Handayani. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(10): 1-15
- Murapi, I., Atirah, D. A. O. Astarini. 2025. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Deskriptif Asosiatif. *Journal*

- of Information System, Applied, Management, Accounting and Reasearch 9(2): 723-736
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 Besaran Alokasi Dana Desa, Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. 5 April 2024. Bojonegoro
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 14 April 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367. Jakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Indeks Desa. 18 Oktober 2024. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. 28 Desember 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052. Jakarta
- Permatasari, N.K., E. Sudrajat, A. Sunarsih. 2024. Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang Dimediasi Oleh Indeks Pembangunan Manusia dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas. *Tirtayasa Ekonomika* 19(2): 275-288
- Puspa, D. F., & R.A. Prasetyo. 2020. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20(2): 281-298
- Ratnasari, B. & M. I. Rahmawati. 2024. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 3(4): 374-392
- Rijal, M. S., & L. Handajani. 2021. Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal Akuntansi* 31(12): 3301-3313
- Rima, M., Hasiah., Azmi. 2022. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. *Jurnal Penelitian Hukum* 31(2): 99-
- Sari, R. 2021. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhan Perak*
- Sengaji, I. & N. F. Asyik. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7(3): 26-32
- Seputro, H. Y., & Muhammad, E. 2022. Efek Akuntabilitas Dalam Memediasi Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Desa Di Madura. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi* 7(2): 285-309
- Setyawati, E. S. 2022 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Semarang
- Tang, S. A., Y. Maro, A. F. Gorang, E. Maruli. 2022. Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8(9): 384-399
- Wardani, S. N. P., & Wahidahwati. 2024. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 13(9): 1-20
- Wijaya, R. S., M. F. Fadillah, F. Ananda. 2023. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25(2): 458-467

Yulitasari & W. P. Tyas. 2020. Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.